

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian oleh Dwiki Achmad Agrianto dengan judul “ Peran Dinas Sosial dalam pembinaan keterampilan remaja putus sekolah (Studi Kasus: Panti Sosial Bina Remaja Provinsi Kalimantan Tengah)” menggunakan teknik kualitatif deskriptif dengan hasil penelitian yang diperoleh adalah mengenai konsep peranan organisasi yang diterapkan oleh panti sosial Bina remaja (PSBR) untuk memberikan pembinaan terhadap remaja putus sekolah yaitu peranan sebagai regulator, peranan sebagai dinamisator , peranan sebagai fasilitator. Pembinaan keterampilan kerja merupakan program pembinaan, yaitu suatu proses program pembinaan dari Panti Sosial Bina secara maksimal sehingga pihak yang menerima manfaat bisa mempunyai skill dan dapat lebih produktif, dapat menghidupi dirinya dan berperan terhadap kehidupan masyarakat. Sementara kemampuan menjahit dasar serta otomotif roda dua dan sedangkan faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pembinaan terhadap remaja putus sekolah.

Hambatan yang dihadapi PSBR adalah minimnya semangat dan gairah dari para remaja yang ikut program serta keterbatasan alokasi anggaran dalam pelaksanaan kegiatan dan keterbatasan fasilitas. Sementara faktor yang mendukung dalam pembinaan ini adalah dukungan dari pimpinan Panti, keteladanan dari pegawai, pengasuh dan pembimbing serta lingkungan panti yang kondusif, tenang, asri dan luas.

Penelitian yang dibuat oleh Winda Yulia Sari dengan judul Peran Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Rumbai dalam Pembinaan Remaja Putus Sekolah, Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan hasil bahwasanya kegiatan PSBR Rumbai terhadap remaja putus sekolah adalah dengan melaksanakan pembinaan yang dilakukan di PSBR mencakup program bimbingan serta layanan sosial. Adapun program pembinaan mencakup pemberian bimbingan fisik yang berkaitan dengan

kegiatan olahraga, apel malam, bimbingan psikologis dan sosial serta pendidikan dan pelatihan keterampilan.

PSBR Rumbai membantu remaja berubah ke arah yang lebih baik atau positif. Misalnya, mereka dapat mulai salat dengan tepat waktu, berperilaku baik dan berkarakter baik. Selain program pembinaan ada juga program pelayanan. Program ini terdiri dari a) tahap pelayanan dalam panti sekaligus tahapan penyuluhan agenda pembinaan PSBR Rumbai untuk sosial, b) tahap pelayanan dalam Panti yang berlangsung selama 6 bulan dan c) tahapan terminasi yang menjadi tahapan akhir proses pembinaan dengan melakukan evaluasi pelaksanaan pelayanan. Adapun hasil dari penggunaan, siswa mengalami transformasi karena remaja yang putus sekolah dan bertempat tinggal di Panti tidak memiliki perbedaan jauh dengan kondisi masyarakat.

Penelitian dibuat oleh Irwani Joko Prasestio melakukan penelitian berjudul Pemberdayaan Remaja Putus Sekolah di Panti Sosial Remaja Bina Kota Palangka Raya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada empat jenis pemberdayaan diantaranya adalah pembinaan jasmani guna menciptakan Keadaan fisik yang lebih sehat, bimbingan mental, yaitu upaya PSBR untuk memberikan bimbingan mental kepada klien dan bimbingan fisik guna mengembangkan serta mengoptimalkan resiliensi fisik klien.

Penelitian dibuat oleh Luci Dian Andayani, Muhammad Yusuf, mambang, Nicodemus R. Torn dengan judul Strategi Pemerintah Daerah dalam mengatasi anak putus sekolah di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif melalui teknik interview, pengamatan serta dokumentasi dan hasil penelitian menunjukkan bahwasanya kebijakan dalam mengantisipasi dan mengendalikan anak putus sekolah di Kota Waringin Timur, Pemda dan juga berbeda saling berkoordinasi kepada dinas pendidikan untuk menangani remaja putus sekolah melalui koordinasi serta sinergitas aparatur TLD untuk mendata anak putus sekolah di Kota Waringin, penggunaan pendekatan persuasif

yang diterapkan oleh tenaga lapangan menjadikan remaja umur sekolah yang tidak di data mampu di data bersedia melanjutkan sekolahnya.

Penelitian yang dibuat oleh Rusmaniah berjudul Pembinaan moral Remaja Putus Sekolah pada PSBR Budi Satria Provinsi Kalimantan Selatan dengan metode deskriptif kualitatif dan hasil penelitian sebagai berikut. Di PSBR Budi Satria Provinsi Kalimantan Selatan menerapkan beberapa tahapan yaitu merencanakan, pendekatan awal, pelayanan Panti, distribusi, pengembangan pembinaan dan juga terminasi. Pemberian Pembinaan untuk penerima manfaat diantaranya yaitu bimbingan sosial, fisik dan keterampilan, kesehatan, mental religius. Dengan adanya kegiatan tersebut menumbuhkan moral generasi muda putus sekolah di PSBR remaja Budi Satrio mengalami kemajuan dari level 1 prakonvensional ke level 2 konvensional menjadi level 3 pasca konvensional, ke level dua konvensional menjadi level tiga pasca konvensional, sesuai dengan arahan tersebut. Sebagian besar dari mereka yang mendapat manfaat dari program tersebut dapat membedakan mana yang baik dan mana yang negatif. Regulasi membuat penerima manfaat lebih bisa mengendalikan diri dan memiliki kepribadian yang lebih baik.

Penelitian yang dibuat oleh Romiyadi, Adi Febrianto, Widya Sinta Mustika dengan judul Pembinaan remaja putus sekolah melalui pelatihan keterampilan pengelasan SMAW dengan metode deskriptif kualitatif dan hasil bahwasanya program tersebut memiliki tujuan utama untuk menjadikan remaja putus sekolah memperoleh kemampuan dan kompetensi sebagai modal masuk dunia kerja dan dapat menghidupi pribadinya beserta keluarganya dan menghindari perilaku menyimpang, hasil program menunjukkan kesuksesan di mana indikasinya yaitu feedback positif penerima pelatihan dan adanya pemahaman terkait pemberian materi.

Penelitian yang dibuat oleh Jasnimar dengan judul Sistem Pembinaan Keterampilan Remaja Putus Sekolah di Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Sosial Bina Remaja (UPT PSBR) Pekan Baru, Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pembinaan terdapat tutor/tutor yang

memiliki kredensial terkait dengan pendidikan, pelatihan, jabatan/pangkat, dan pengalaman. Pengumpulan data dengan teknik pengamatan, interview dan dokumentasi dan dianalisa melalui analisis kualitatif. Unit Pelaksana Rekayasa Dinas Sosial (UPT PSBR) Pekanbaru menawarkan program pembinaan pemuda luar sekolah dengan tutor yang dipersiapkan untuk mendidik dan membina pemuda dalam bidang fisik khususnya olah raga, mental, dan keterampilan untuk menjadikan remaja cerdas dan keterampilan untuk menjadikan remaja memiliki kecerdasan serta keterampilan agar menjadi pewaris bangsa menuju jalan lebih maju serta membentuk pemuda yang bermanfaat untuk pribadinya, keluarganya dan sosial. Adapun faktor yang mempengaruhi sistim pembinaan remaja adalah kemauan yang kuat daei remaja, sarana dan prasarana dan perusahaan-perusahaan tempat mereka magang. Sedangkan faktor yang menghambat pembinaan adalah kurangnya tahapan perekrutan yang tidak sesuai dengan kriteria umur 13-20 tahun, keterbatasan fasilitas dan juga tenaga ahli.

Penelitian ini dibuat oleh Putri Wahyu W dengan judul Upaya Pembinaan Remaja Putus Sekolah pada Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Mardi Karya Utama Jombang, dengan teknik kualitatif melalui teknik analisa deskriptif. Hasil studi menunjukkan bahwasanya pekerja sosial di Panti sosial remaja Bina Mardi Karya Utama Jombang memberikan pembinaan kepada anak putus sekolah. Saat memberikan pembinaan, Pekerja Sosial berkolaborasi dengan sumber daya terampil (guru dan pengasuh). untuk terus memberikan bimbingan kepada remaja putus sekolah, pekerja sosial juga melakukan intervensi yang dilakukan Pekerja Sosial juga melakukan usaha pembinaan kemandirian untuk anak putus sekolah berupa bimbingan fisik, psikologis, sosial dan juga keterampilan.

Penelitian ini dibuat oleh Fitri Warman dengan judul Pembinaan Remaja Putus sekolah dan Keterampilan (Studi pada UPTD Pelayanan Sosial Bina Remaja (PSBR) Raden Intan Lampung) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, hasil penelitian, program dari PSBR Raden Intan Lampung untuk anak putus sekolah dan terlantar berupa bimbingan

fisik, sosial, mental serta keterampilan menjahit dan service motor dan keterampilan elektronik. Adapun aspek penunjang diantaranya yaitu motivasi remaja, adanya pendanaan, adanya fasilitas dan sinergitas dengan Mitra PSBR Raden Intan Lampung dan aspek penghambatnya yaitu kurangnya kelengkapan alat-alat untuk mengajar keterampilan dan minimnya waktu dari pihak PSBR untuk membimbing remaja tersebut.

Penelitian ini dibuat oleh Siti Rahman Farida dengan judul Peran Pemerintah Daerah dalam pembinaan remaja putus sekolah di Kecamatan Ile Ape Kabupaten Lembata Nusa Tenggara Timur hasil penelitian bahwa Pemda berdampak signifikan untuk mengurangi angka putus sekolah dan menjalankan program wajib belajar 12 tahun sehingga agar dapat memberikan jaminan Hak asasi masyarakat berdasarkan tujuan reformasi sistemik dengan adanya support finansial, beasiswa perguruan tinggi bagi masyarakat miskin melalui program BSM (Bantuan untuk anak-anak miskin), hal tersebut untuk mencegah terjadinya putus sekolah, dan juga melakukan kegiatan yaitu sosialisasi edukasi bekerja sama dengan pihak Desa serta Kelurahan dengan mengadakan penyuluhan dan mendirikan Taman baca untuk menstimulus penduduk terutama orang tua terkait edukasi dan adanya kerjasama dengan lembaga-lembaga masyarakat yang terdapat di kecamatan ileap kabupaten lembatu di sektor pendidikan serta sebagai cara menangani remaja putus sekolah.

Dalam penelitian yang terdahulu dan penelitian yang penulis teliti dalam memberikan pembinaan atas remaja putus sekolah. Program pembinaan yang dilaksanakan oleh panti sosial Bina remaja (PSBR) yaitu dengan melayani secara sosial dan memberikan bimbingan kepada remaja tersebut, tetapi yang diteliti peneliti terdahulu berfokus Pada pelaksanaan bimbingan yang terdiri dari bimbingan psikologis, fisik, sosial dan pemberian keterampilan sehingga remaja putus sekolah tersebut mendapatkan pendidikan non formal dan pemberian keterampilan agar remaja putus sekolah nantinya mendapat profesi keterampilan sedangkan pelayanan sosial yang diberikan selama di PSBR kurang mendapatkan

perhatian. Sedangkan penelitian yang sekarang dilaksanakan dengan melihat pelaksanaan program pembinaan yang dilaksanakan di PSBR yaitu baik pelayanan sosial dan bimbingan pengajaran dan keterampilan.

Pelayanan sosial dari pendekatan awal yaitu seleksi calon klien PSBR, sampai masuk ke PSBR dimana klien ditempatkan di asrama dan mendapatkan kebutuhan dasar klien berupa makan, kesehatann, pakaian sampai klien mendapat kan bimbingan dan evaluasi serta penyaluran klien ke keluarganya atau masyarakat.

Sedangkan perbedaan dengan peneliti yang terdahulu yang memberikan pembinaan terhadap remaja putus sekolah di luar panti, jelas terdapat perbedaan yaitu apabila di luar panti tidak memberikan kebutuhan dasar remaja yang putus sekolah tetapi program pemerintahan harus dapat memberikan pembinaan pemberian beasiswa terhadap remaja dari keluarga miskin agar masih dapat sekolah, sedangkan bagi remaja yang sudah tidak sekolah lagi diberikan pembinaan dari institusi masyarakat.

#### **A. Kebijakan Publik**

Kebijakan merupakan seperangkat Gagasan dan prinsip sekaligus acuan serta landasan perencanaan untuk melaksanakan kegiatan serta perbuatan dan juga kepemimpinan. Hal tersebut bisa diimplementasikan dalam pemerintah, institusi ataupun swasta. Tinjauan kebijakan atau kebijakan dapat merujuk pada pengambilan keputusan penting dalam pemerintahan atau organisasi, termasuk prioritas program atau pengeluaran.

Berdasarkan Thomas R. Dye (2007:86), definisi kebijakan publik yaitu pilihan pemerintah baik melakukan sesuatu maupun tidak melakukan sesuatu. Artinya apabila pemerintah menjalankan suatu hal, maka harus terdapat tujuan dan kebijakan publik mencakup semua perbuatan tersebut, jadi bukan semata-mata pernyataan kehendak pemerintah untuk melakukan sesuatu.”(Muadi et al., 2016).

Menurut deskripsi tersebut, Kebijakan Publik bisa didefinisikan sebagai perilaku pemerintah secara sadar, secara sengaja, dan dengan tujuan meraih suatu tujuan. Selain itu, karena Kebijakan Publik dilaksanakan

berdasarkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, Kebijakan Publik mempunyai fleksibilitas yang dapat diubah dan disesuaikan sesuai dengan keadaan masyarakat. Guna memahami pengertian dari Kebijakan Publik, ada banyak komponen yang diperlukan:

1. Perbuatan pemerintah dengan wewenangnya, di mana kebijakan publik merupakan perbuatan di mana pembuatnya serta implementatornya yaitu organisasi pemerintah berdasarkan wewenang hukum, politik dan finansial
2. Kebijakan bukan sekedar pernyataan namun harus diimplementasikan dengan nyata.
3. Kebijakan didasarkan maksud serta suatu tujuan
4. Kebijakan itu senantiasa berguna demi kepentingan anggota masyarakat

Kebijakan publik adalah sebuah proses. Itu dibuat untuk mencapai tujuan tertentu. Ini akan gagal jika implementasinya tidak ada hubungannya dengan tujuan tersebut. Thomas R. Dye (2001) menjelaskan proses kebijakan publik dalam beberapa tahapan, antara lain:

1. Identifikasi apa yang menuntut tindakan pemerintah dapat digunakan untuk membuat kebijakan.
2. Agenda setting merupakan upaya untuk menarik perhatian publik, pejabat, dan media tentang pengambilan keputusan atas permasalahan masyarakat
3. Tahap perumusan kebijakan adalah akumulasi yang melibatkan inisiatif dan perancangan proposal kebijakan dengan adanya badan rencana kebijakan, stakeholder, lembaga legislatif, presiden dan juga birokrasi pemerintah.
4. persetujuan kebijakan adalah proses penyesuaian dan persetujuan konsensual dari prinsip-prinsip yang diakui dan standar yang disetujui.
5. Penerapan kebijakan dicapai dengan birokrasi yang terorganisir, pendanaan masyarakat, serta tindakan eksekutif. Ini menjelaskan

terkait aktivitas yang berorientasi untuk mengalokasikan program tertentu untuk mencapai tujuan pembuatan kebijakan.

6. Evaluasi kebijakan adalah tahapan paling akhir dan proses kebijakan, dan diimplementasikan instansi pemerintah, perusahaan dan publik. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dampak kebijakan publik.

Thomas R. Dye menjelaskan bahwasanya proses kebijakan publik mencakup berbagai langkah-langkah. Keuntungan dari langkah-langkah ini adalah bahwa mereka dapat digunakan oleh para legislator sebagai referensi dan membuat prosesnya lebih mudah dipahami. Dalam kebijakan publik, ada keterkaitan pemerintah yang menjadi pembuat kebijakan dan publik terkait dengan kebijakan. Untuk membuat kebijakan yang menguntungkan masyarakat, perlu mendengarkan atau menerima saran dari masyarakat agar pemerintah dapat merumuskan kebijakan

Kelemahannya adalah karena proses kebijakan publik merupakan proses yang rumit dan kompleks dan tidak semua pemangku kebijakan dapat memahami tahapan dalam proses kebijakan publik.

## **B. Pelaksanaan kebijakan**

Berdasarkan pengertian KBBI, implementasi adalah proses, cara perbuatan melaksanakan rencana, keputusan serta lain-lain atau dapat diartikan sebagai penerapan teori pada kenyataan untuk membuahkan kebermanfaatan. Dengan kata lain implementasi adalah aplikasi atau penerapan yang bersumber dari suatu teori dan diaplikasikan secara nyata pada suatu masalah untuk bisa menarik suatu konklusi nyata.

George Edward III (1980: 1) Menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah sistematis kritik sebab bagaimanapun baiknya kebijakan direncanakan jika tidak ada persiapan dan diimplementasikan tujuan dari kebijakan publik tidak akan tercapai

Berdasarkan pengertian “implementasi” atau “pelaksanaan kebijakan”, Bisa ditarik kesimpulan bahwasanya implementasi berhubungan terhadap beberapa program dimana pemerintah mengontrol Bagaimana mengatur, menafsirkan dan mengimplementasikan kebijakan



tersebut sehingga pemerintah mampu mengelola metode, unit dan sumber daya untuk menunjang implementasi program dan menginterpretasikan perencanaannya serta petunjuk yang digunakan untuk melaksanakan program.

Dalam penulisan ini teori yang dipakai adalah teori dari George Edward III, karena teori tersebut dianggap tepat sebagai indikator pelaksanaan pembinaan di Panti Sosial Bina Remaja Provinsi Kalimantan Tengah.

Edward III membuat sejumlah asumsi untuk keperluan penelitian tentang praktik politik. Asumsi ini meliputi hal-hal yang diperlukan bagi keberhasilan pelaksanaan suatu undang-undang serta hambatan-hambatan yang timbul dalam proses pelaksanaannya. Faktor-faktor yang terkait dengan pelaksanaan hukum publik meliputi:

1. Pelaksanaan kebijakan dan aspek struktural institusi meliputi prosedural dan struktural birokrasi. Prosedural dalam penerapan kebijakan menggunakan sop sebagai pedoman bagi pejabat dan pegawai dalam bertindak agar tidak terjadi penyimpangan tujuan. Aspek struktur birokrasi meliputi fakta bahwa birokrasi yang berlebihan cenderung mengganggu struktur dan penyebabnya aktivitas organisasi menjadi tidak fleksible,
2. Komunikasi adalah aktivitas yang memungkinkan orang untuk memahami konsep melalui sistem yang dapat ditunjukkan dengan bahasa, simbol, atau tindakan.

Pelaksana kebijakan memerlukan informasi untuk memahami maksud, arah, dan tujuan kebijakan, dan bisa menyiapkan setiap hal terkait implementasi kebijakan

3. Sumber daya diperlukan untuk mendukung seperti , fasilitas, dan sarana.

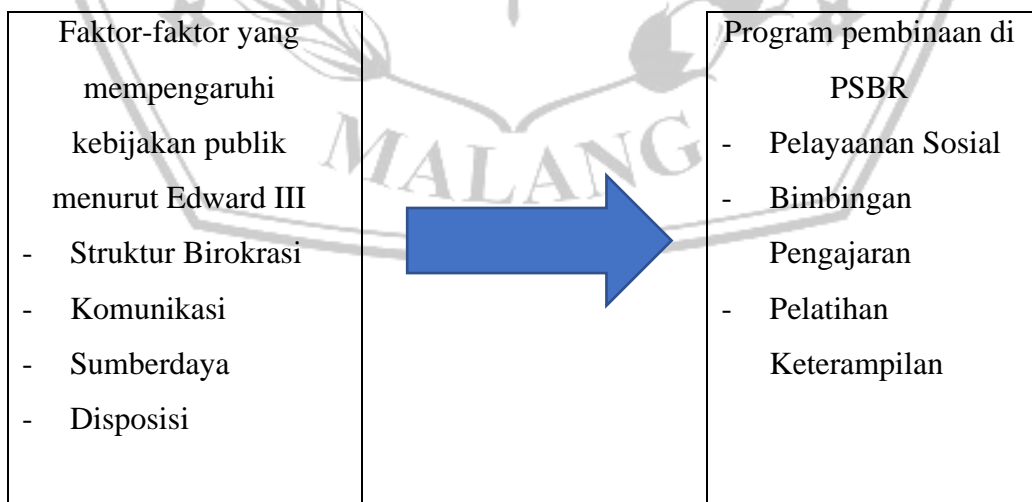
4. disposisi atau sikap pelaksana adalah watak atau tabiat dari pelaksana kebijakan. agar implementasi kebijakan yang sejalan dengan tujuan dapat terwujud.

Kelebihan dari Teori Edwad III tentang Faktor yang berpengaruh terhadap penerapan kebijakan sudah terdapat di setiap lembaga organisasi atau instansi dan apabila hal tersebut dilakukan kesesuaian antara faktor satu dengan faktor lain dan adanya kesamaan pandangan dalam mencapai tujuan keberhasilan.

Berdasarkan pandangan bahwa Tingginya tingkat kesesuaiannya dapat menjadikan meningkatnya probabilitas kesuksesan pelaksanaan kebijakan sehingga membuahkan hasil optimal.

Salah satu kelemahan teori Edward III adalah jika salah satu unsur dalam kebijakan implementasi tidak berjalan, maka tujuan kebijakan implementasi tidak akan sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu unsur yang tidak berfungsi adalah informasi atau komunikasi yang sangat penting untuk pemersatu pemahaman. Jika tidak ada penjabaran akan menyebabkan salah penjabaran kegiatan yang dilakukan sehingga menyebabkan tujuan tidak sesuai dengan harapan. Demikianlah, teori Edwards yang menyatakan bahwa:

**Gambar 3.1 PELAKSANAAN PROGRAM PEMBINAAN**



## REMAJA PUTUS SEKOLAH

Peneliti menemukan bahwa teori tersebut berfungsi sebagai indikator dalam pelaksanaan pembinaan di Panti Sosial Bina Remaja Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah nomor 45 tahun 2017 tentang pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja unit pelaksana teknik Panti Sosial Bina Remaja Provinsi Kalimantan Tengah membantu peneliti memahami bagaimana kebijakan pemerintah daerah dilaksanakan.

### C. Pembinaan Remaja Putus Sekolah

*Sedangkan apa yang dimaksud dengan remaja putus sekolah, di sisi lain, berasal dari istilah Latin *adolensence*, yang berarti berkembang atau menjadi dewasa. Masa muda, menurut Asrori dan Ali (2016), adalah masa ketika orang berintegrasi ke dalam masyarakat dewasa dan ketika orang yang lebih muda tidak menganggap diri mereka lebih rendah dari orang yang lebih tua melainkan setara. Remaja adalah masa ketika orang beralih dari anak-anak menjadi dewasa. Bagi wanita, remaja terjadi selama 12-21 tahun, Sedangkan untuk pria berlangsung selama 13-22 tahun. Masa remaja dicirikan oleh Hurlock (1993: 207) sebagai tahap kehidupan yang paling menantang dan masa konflik besar serta eksplorasi identitas diri.*

*Dinas Sosial mengatakan bahwa yang menjadi kategori remaja adalah baik wanita maupun laki-laki yang telah berumur 16 -19 tahun yang diterima masuk dalam Panti Sosial Bina Remaja provinsi Kalimantan Tengah.*

Dari hal tersebut di atas bisa ditarik kesimpulan bahwasanya remaja merupakan proses transformasi atau peralihan dari periode anak menuju dewasa dengan terjadinya transformasi fisik baik dari dalam diri remaja sendiri, dan merupakan periode.

Pendidikan formal (sekolah) sangat diperlukan oleh remaja untuk mengembangkan minat, potensi dan bakat yang ada dalam dirinya serta dapat mengembangkan kreativitasnya untuk mencapai cita-citanya dan

menunjang kehidupan di masa mendatang. Tetapi tidak jarang remaja untuk memenuhi kondisi tersebut banyak mengalami kendala dan keterbatasan baik dari keluarga maupun masyarakat. Apabila kendala sulit diatasi, remaja tersebut dapat putus sekolah.

Putus sekolah menurut Departemen Sosial (Depsos, 2008 ) adalah suatu kondisi dimana pembelajaran seorang siswa telah berakhir di sekolah tempat mereka terdaftar. Beberapa variabel, termasuk situasi keuangan keluarga yang di bawah standar, berkontribusi pada pengabaian remaja putus sekolah ini dari lembaga formal.

Sedangkan pengertian Remaja terlantar (Depsos, 2008) orang yang berusia antara 15 dan 18 tahun yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka secara memadai secara fisik, spiritual, atau sosial karena berbagai faktor, termasuk miskin atau tidak kompeten, walinya meninggal, atau memiliki keluarga yang tidak harmonis.

Masalah putus sekolah ini jika tidak segera ditangani dapat menimbulkan masalah yang lebih serius antara lain anak jalanan, penggunaan narkoba, mabuk, pengamen, pencopet, pergaulan bebas, dan kegiatan kriminal lainnya.

Sedangkan pembinaan adalah pemberian pertolongan dari orang dewasa untuk anak-anak. Dan pada umumnya pembinaan terjadi melalui proses tertentu yang bertujuan menjadikan adanya perubahan perilaku seseorang agar bisa lebih Mandiri serta memiliki tanggung jawab atas pribadinya sehingga tercapai cita-cita atau tujuan, hal itu didukung penjelasan dari Maolani pembinaan adalah:

Untuk membina, melakukan bimbingan serta pengembangan karakteristik yang komprehensif, imbang dan selaras dengan wawasan serta kompetensi berdasarkan bakat dan kapasitasnya untuk dijadikan bekal lebih berinisiatif mengoptimalkan pribadinya, lingkungan yang lebih bermartabat, berkualitas dan menjadi manusia seutuhnya, diperlukan proses pendidikan baik formal dan non formal dengan tersistematis, terstruktur, sadar dan responsif. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan

pelatihan sesuai dengan perkembangan dirinya dan dapat mengembangkan kecerdasannya berdasarkan minat dan keterampilannya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 Tentang Perlindungan Anak.

Dari hal tersebut, maka pemerintah dalam memberikan pembinaan terhadap remaja putus sekolah sesuai dengan Kebijakan pemerintah dalam memberikan pembinaan dan pelayanan dalam sistem lembaga dalam panti berdasarkan Keputusan Menteri Sosial No. 50/HUK/2004 tentang Standarisasi Panti Sosial yang dinyatakan:

“Program pembinaan dan bantuan sosial sistem panti sosial bagi remaja yang tidak bersekolah. Jika tugas dan tanggung jawab keluarga dan masyarakat tidak dilaksanakan secara efektif untuk memenuhi kebutuhan anggotanya, maka pelayanan sosial yang disediakan oleh sistem panti sosial adalah layanan alternatif. Tugas dan tanggung jawab panti sosial adalah memberikan bimbingan dan pelayanan sosial di seluruh tahapan pelayanan sosial serta memberikan bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial serta melakukan bimbingan fisik, psikologis spiritual dan sosial serta keterampilan guna mengembangkan mutu SDM serta mendayagunakan mereka yang memiliki permasalahan Kesejahteraan Sosial untuk hidup sehat fisik, mental dan sosial.

Persyaratan dalam buku Standar Pelayanan Minimal PSBR terbitan Kemensos menyebutkan bahwa pelayanan sosial bagi klien di panti asuhan memiliki batasan waktu tertentu berdasarkan Keputusan Menteri Sosial tersebut di atas. Selama kerangka waktu ini berlaku, lembaga sosial akan memenuhi kebutuhan dasar klien akan makanan, pakaian, dan perawatan kesehatan serta membimbing mereka melalui tahapan pendekatan awal, implementasi layanan, penyelesaian, dan bimbingan lebih lanjut sambil juga memberikan mereka dengan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial.

Sesuai uraian diatas, maka pemerintah daerah provinsi Kalimantan Tengah dalam menanggulangi remaja putus sekolah dengan diterbitkan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah nomor 45 tahun 2017

tentang pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja unit pelaksana teknik pada Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah. (PSBR) yang merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai tanggung jawab menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis penunjang Dinas Sosial dalam memberikan pembinaan, pelayanan, dan rehabilitasi sosial yang bersifat promosi di berupa pembinaan pengetahuan dasar pendidikan, pelatihan fisik, mental, sosial, dan keterampilan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 45 Tahun 2017 Pasal 14.

Sesuai rencana strategis (Renstra) dinsos Provinsi Kalteng tahun 2021-2026 yang disahkan dengan Pergub Provinsi Kalteng no. 39/2021 perihal Renstra perangkat daerah Provinsi Kalteng tahun 2021-2026. PSBR merupakan unit pelaksana teknis dinsos Provinsi Kalimantan Tengah yang mempunyai tugas pokok memberikan rehabilitasi remaja dan anak putus sekolah serta terlantar dengan Membina dan membimbing mereka. Sesuai anggaran yang telah disediakan oleh dinsos Provinsi Kalteng bahwa PSBR Provinsi Kalteng dengan tugas pokok memberikan rehabilitasi sosial dan pembinaan terhadap remaja putus sekolah dan anak terlantar sebanyak 40 orang selama 5 bulan per tahun. Disebutkan dalam Renstra dinsos Kalteng bahwasannya implementasi rehabilitasi sosial dan pembinaan terhadap anak terlantar dan putus sekolah yaitu dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka terdiri:

1. Pengasuhan
2. Penyediaan makanan
3. Penyediaan perbekalan kesehatan di dalam Panti
4. Penyediaan asrama yang mudah diakses
5. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial
6. Pelatihan keterampilan
7. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar.
8. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
9. Akses layanan pengasuhan kepada keluarga pengganti

10. Koordinasi, sinkronisasi dan pembinaan pelaksanaan bidang rehabilitasi sosial dasar anak terlantar dan putus sekolah di dalam Panti.

